

Kerangka Acuan Kerja

Acara : **Pertemuan Regional Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (KPDP-TCT) Provinsi NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara di Jakarta.**

Durasi acara: 8 jam

I. Pendahuluan

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 menetapkan bahwa sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan kekayaan alam di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang harus dikelola secara berkelanjutan, guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka tatakelola sumberdaya ikan yang baik menjadi salah satu prasyarat yang harus dirancang dan dilaksanakan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan potensi sumberdaya ikan termasuk jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis penting antara lain seperti tuna, cakalang dan tongkol. Menurut the *State of World Fisheries and Aquaculture* (SOFIA), Indonesia memberikan kontribusi sekitar 16% terhadap produksi perikanan TCT dunia dan sekitar 20% terhadap perikanan nasional. Mengingat peran penting perikanan TCT untuk Indonesia, telah diterbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol. Keputusan ini menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya TCT secara berkelanjutan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah termasuk para pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Peter Willian (2017), pengelolaan tuna mutlak didasarkan pada ketersediaan dan mengatakan:

- a. Data tidak tersedia (*No Data*) maka tidak ada pengelolaan (*No Management*)
- b. Data tidak baik (*Poor Data*), maka pengelolaan memiliki ketidakpastian (*Uncertainty*).
- c. Data yang bagus (*Good Data*), maka pengelolaan dapat memprediksi (*Predictable*).

Mengingat data merupakan dasar pelaksanaan praktek pengelolaan TCT, maka Dinas Perikanan dan Kelautan bersama MDPI menggagas pembentukan Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP) TCT di tingkat provinsi yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB, dan NTT. Komite ini merupakan salah satu wadah kolaborasi

antar pemangku kepentingan perikanan TCT untuk bersinergi mewujudkan pemanfaatan sumberdaya TCT secara berkelanjutan. Mengingat faktor kebersamaan antar pemangku kepentingan menjadi syarat dalam proses pengambilan keputusan pada komite ini, maka komite ini sesungguhnya merupakan **Komite** bersama, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan dapat lebih diperkuat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran **serta masyarakat**.

II. Tujuan

Pertemuan Regional Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (KPDP-TCT) dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

1. Berbagi informasi terhadap capaian dan tantangan pelaksanaan KPDP;
2. Pengesahan perubahan nama dan konsep Komite Pengelola Data Perikanan (KPDP) menjadi Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (*Fisheries Co-Management Committee*) dengan singkatan **FCMC**.
3. Meningkatkan pemahaman dan berbagi informasi terhadap manfaat pengelolaan bersama

III. Hasil yang diharapkan

Adapun hasil yang diharapkan setelah pertemuan ini adalah:

1. Adanya kesepakatan bersama terhadap perubahan nama dan konsep KPDP dalam mendukung *co-management*
2. Stakeholder memiliki visi dan pemahaman yang sama dalam *co-management* yang sedang dijalankan.
3. KKP mengetahui adanya *co-management* di daerah sebagai upaya bersama dalam meningkatkan peran dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan
4. Adanya rekomendasi untuk pelaksanaan *co-management* yang lebih baik.

IV. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pertemuan ini rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Januari 2019
Waktu : 08.30 – Selesai WIB
Tempat : Ruang Rapat Arwana I
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No.16 GMB 2 Lantai 14
Jakarta Pusat - Indonesia

V. Agenda Kegiatan

Tentative agenda pertemuan ini sebagaimana tabel dibawah:

Waktu	Kegiatan	Keterangan	PJ
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta		Panitia
08.30 – 09.15	Pembukaan Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Menyanyikan lagu Indonesia Raya • Do'a • Pengantar Plt. Direktur PSDI - DJPT • Pengantar MDPI • <u>Arahan dan Pembukaan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</u> • Foto Bersama 		<ul style="list-style-type: none"> • MC • MC • Plt. Direktur PSDI - DJPT • MDPI • <u>Direktur Jenderal Perikanan Tangkap</u> • Panitia
09.15-10.00	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengelolaan tuna Nasional 		<ul style="list-style-type: none"> • Kasubdit SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI - DJPT
	<ul style="list-style-type: none"> • Outlook kebijakan pembinaan nelayan kecil TA 2019 		<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Program, Setditjen PT – DJPT
10.00- 10.45	Berbagi pengalaman terhadap capaian & tantangan dalam KPDP di masing-masing provinsi. Presentasi Panel I <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Maluku • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Maluku Utara • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Sulawesi Utara 	Waktu Presentasi Masing-masing 10 menit. Waktu tanya jawab masing-masing 5	Moderator
10.45 – 11.00	Coffee Break		
11.00 – 11.45	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. NTB • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. NTT • Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Prov. Sulawesi Selatan 	Waktu Presentasi Masing-masing 10 menit. Waktu tanya jawab masing-masing 5 menit	Moderator

11.45 – 12.30	Overview pengelolaan bersama Diskusi Panel <ul style="list-style-type: none"> • Dasar-dasar dalam co-management • Perspektif nasional co-management di Indonesia • Pengalaman terhadap pelaksanaan co-management 	Waktu presentasi masing-masing 10 menit.	<ul style="list-style-type: none"> • Beny Iskandar (DKP NTB) • Riza • Abdullah Assegaf (DKP Maluku Utara)
12.30 – 13.30	<i>ISHOMA</i>		<i>Panitia</i>
13.30 – 14.30	FGD: Bagaimana agar co-management di daerah dapat terhubung dalam Lembaga Pengelolaan Perikanan – WPPNRI	Presentasi	Ernes D. Hamel (DKP NTT)
14.30 – 15.00	Diskusi terkait kesepakatan nama dan konsep Komite	Diskusi	Prof. Jamaludin Jompa (UNHAS)
15.00 – 15.15	<i>Coffee Break</i>		
15.15 – 16.30	Diskusi dan rekomendasi pelaksanaan co-management yang lebih baik	Diskusi	Wildan
16.30 – 17.00	<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan penghargaan kepada Pelaku Usaha Perikanan - Penutup 		Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

VI. Peserta

Peserta yang akan diundang adalah sebagai berikut:

NO	INSTANSI/LEMBAGA	JUMLAH
A. Kementerian Kelautan dan Perikanan		
1	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan – DJPT;	1
2	Kepala Pusat Riset Perikanan – BRSDMKP;	1
3	Sekretaris Ditjen. Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;	1
4	Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap, Setditjen PT - DJPT;	1
5	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Dit. KAPI – DJPT;	1
6	Direktur Pelabuhan Perikanan, Dit. PP – DJPT;	1
7	Plt. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Dit. PDK – DJPT;	1
8	Kepala Bagian Program, Setditjen PT - DJPT;	1
9	Kasubdit ZEEI dan Laut Lepas – DJPT;	1
10	Kasubdit SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan – DJPT;	1
11	Kasubdit Pemantauan dan Analisis Pengelolaan SDI – DJPT;	1
12	Kasubdit Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan, Dit. PDK – DJPT;	1
13	Kasubdit Usaha Nelayan, Dit. PDK – DJPT;	1
14	Kepala Loka Riset Perikanan Tuna Bali, PUSRISKAN - BRSDMKP;	1
15	Kepala Seksi Pemanfaatan PSDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI – DJPT;	1
16	Kepala Seksi Tata Kelola PSDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI – DJPT;	1
17	Kepala Seksi Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dit. PSDI – DJPT;	1
18	Kepala Seksi Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Dit. PSDI – DJPT;	1
19	Hary Christijanto, M.Sc, Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Ahli Madya, Dit. PSDI – DJPT;	1
20	Putuh Suadela, S.Pi, MSEM, Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Muda, Dit. PSDI – DJPT;	1
21	Satya Mardi, S.Pi, Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan Muda, Dit. PSDI – DJPT;	1
22	Cahyani Dwi Setiwati, S.F, M.Mar.P, Analis Kelautan dan Perikanan, Dit. PSDI – DJPT;	1
23	Mumpuni C. Pratiwi, S.Pi, M.Sc, Analis Kelautan dan Perikanan, Dit. PSDI – DJPT;	1
25	Saraswati, S.Pi, Calon Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan, Dit. PSDI – DJPT;	1
26	Neneng, Pengadministrasi Sarana dan Prasarana, Dit. PSDI – DJPT;	1
27	Enang Rucita, S.Sos, Analis Kelautan dan Perikanan, Dit. PSDI – DJPT;	1
28	Dwi Ani Juliastuti, A.Md,S.A.P, Pengadministrasi Umum, Dit. PSDI – DJPT;	1
29	Roy's Birul M., S.Kom, Staf Subdit SDI ZEEI dan Laut Lepas, Dit. PSDI – DJPT.	1
B. 24		
30	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur	1

31	Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang	1
32	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bone	1
33	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buru	1
34	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tengah	1
35	Kepala Dinas Perikanan Kota Ternate	1
36	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan	1
37	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pulau Morotai	1
38	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe	1
C. Ketua Komite Pengelola Data Perikanan TCT		
39	Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Maluku	1
40	Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Maluku Utara	1
41	Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi NTB	1
42	Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi NTT	1
43	Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Sulawesi Utara	1
44	Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Sulawesi Selatan	1
45	Prof. Jamaluddin Jompa, Ketua KPDP Provinsi Sulawesi Selatan	1
D. Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian		
46	LIPI Ambon	1
E. Pelaku Usaha		
47	PT. ANOVA	1
48	PT. Harta Samudera	1
49	PT. BOGI	1
50	PT. Nutrindo Fresh Food International	1
51	PT. SMS	1
52	Supplier Lombok – UD. Baura;	1
53	Supplier Kupang – UD. Tunas Harapan;	1
54	Supplier Bone – H. Andi Jahi;	1
55	Supplier Buru – Sdr. Hayon;	1
56	Supplier Seram Selatan;	1
57	Supplier Seram Utara – Sdr. Udin;	1
58	Supplier Pulau Bisa – Sdr. Larudin;	1
59	Supplier Bacan – Sdr. Pian;	1
60	Supplier Ternate – Sdr. Anas;	1
61	Supplier Morotai – Sdr. Kahar;	1
62	Supplier Sangihe – Sdr. Muksin;	1
F. Nelayan		
63	Perwakilan Nelayan Lombok	1
64	Perwakilan Nelayan Kupang	1
65	Perwakilan Nelayan Bone	1
66	Perwakilan Nelayan Buru	1
67	Perwakilan Nelayan Seram Selatan	1
68	Perwakilan Nelayan Seram Utara	1

69	Perwakilan Nelayan Pulau Bisa	1
70	Perwakilan Nelayan Bacan	1
71	Perwakilan Nelayan Ternate	1
72	Perwakilan Nelayan Morotai	1
73	Perwakilan Nelayan Sangihe	1
G. Partner Kerja (Asosiasi dan LSM)		
74	AP2HI	1
75	IPLNF	1
76	TNC	1
77	WWF	1
78	SFP	1
79	WCS	1
80	MDPI	11
H. Donor		
81	USAID SEA Project	1
82	USAID Ocean	1
83	Walton	1
Total Peserta		92

VII. Pembiayaan

Pada kegiatan pertemuan ini, MDPI akan memberikan dukungan pembiayaan kegiatan selama pertemuan berupa tempat kegiatan, paket akomodasi, transportasi dan kebutuhan pertemuan sesuai daftar undangan. Adapun detail pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah dan Nelayan.

- MDPI akan menyediakan biaya untuk (i) tiket pesawat (PP) kelas ekonomi, (ii) paket pertemuan akomodasi 2 (dua) malam dan konsumsi selama pertemuan, (iii) uang harian sesuai standar MDPI selama 3 (tiga) hari, (iv) biaya transport lokal (bukan rental).

2. Supplier.

- MDPI akan menyediakan biaya untuk (i) tiket pesawat (PP) kelas ekonomi, (ii) paket pertemuan akomodasi 2 (dua) malam dan Konsumsi selama pertemuan (iii) biaya transport lokal (bukan rental).

3. Perusahaan Unit Pengolahan Ikan, Eksportir dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partner

- MDPI akan menyediakan biaya konsumsi selama pertemuan

Adapun beberapa hal yang perlu diketahui adalah sebagai berikut:

1. Akomodasi/penginapan akan disediakan oleh panitia sesuai ketentuan *single room* untuk Kepala Dinas KP Provinsi dan *Share-Room* untuk peserta lainnya.
2. Tiket pesawat (PP) langsung diadakan oleh MDPI melalui *travel agent* yang telah memiliki kerja sama dengan MDPI.
3. Untuk mendukung kelancaran pemesanan tiket pesawat dan penyediaan akomodasi hotel, kami sangat mengharapkan konfirmasi kehadiran yang dapat disampaikan kepada **Sdri. Santri Dinalhusna (HP: +628982687552 via telp/sms/WA) paling lambat tanggal 8 Januari 2019.**
4. Check-in di Hotel pukul 14:00 dan check-out pukul 12:00 waktu setempat.
5. Transportasi lokal yang diberikan adalah transportasi reguler (bukan sewa mobil) pergi dan pulang, yang akan dibayarkan saat pertemuan selesai.
6. Konsumsi yang disediakan panitia untuk seluruh peserta adalah konsumsi saat pertemuan, yaitu 2 kali *Coffee Break* dan 1 kali Makan Siang.

VIII. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai gambaran penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud.